

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Teknologi informasi adalah suatu aset berharga dalam sebuah sistem organisasi perusahaan, peranan teknologi informasi saat ini telah mampu mengubah pola pekerjaan, kinerja pegawai, bahkan sistem manajemen dalam mengelola sebuah organisasi, teknologi informasi juga memberikan peranan besar terhadap perkembangan organisasi. Utomo dan Mariana (2011) menyatakan bahwa Teknologi Informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi hampir semua organisasi perusahaan karena dipercaya dapat membantu meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses bisnis perusahaan. Dengan demikian agar tercapainya efisiensi dan efektifitas, maka diperlukanlah suatu pengelolaan yang baik dan benar terhadap teknologi informasi yang terdapat dalam perusahaan tersebut sehingga diharapkan nantinya teknologi informasi ini mampu menunjang kesuksesan organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan.

Otorita Batam merupakan cikal bakal dari Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Pada Peraturan Pemerintah (PP) 46 tahun 2007 disebutkan bahwa Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berubah menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Batam dengan keberadaannya selama 70 tahun sejak PP 46 ditandatangani.

Badan Pengusahaan Batam telah menerapkan penggunaan teknologi sebagai penunjang kinerja dalam mengadakan barang atau jasa secara elektronik. Badan Pengusahaan (BP) Batam melakukan migrasi sistem aplikasi pengadaan barang/jasa secara elektronik dari selama ini menggunakan aplikasi SePP (Sistem Elektronik Pengadaan Pemerintah) sejak tahun 2008, beralih ke SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik). Sistem ini dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk pelaksanaan tahun anggaran 2013 dengan alamat <http://lpse.bpbatam.go.id>. Migrasi penggunaan aplikasi pengadaan barang/jasa ini merupakan upaya yang dilakukan BP Batam untuk mengoptimalkan sistem layanan nasional (Portal Pengadaan Nasional) pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik diatur dalam Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan sebagaimana ketentuan dalam pasal 131 ayat (1) bahwa pada tahun 2012 K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan. Selain itu dalam Perpres 54 Tahun 2010 juga mengatur mengenai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai

unit kerja K/L/D/I untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik wajib memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Proses Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara elektronik ini akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Selain itu, proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik ini juga dapat lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan (*non discriminative*) bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dibuat untuk mewujudkan harapan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik. Layanan yang tersedia dalam SPSE saat ini adalah *E-Tendering* yaitu tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik dengan menyampaikan 1 (satu) penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Tata cara *E-Tendering*, syarat dan ketentuan serta panduan pengguna (*user guide*) diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara *E-Tendering*. Selain itu di dalam SPSE juga telah disiapkan fasilitas

untuk proses audit secara *online* (*E-Audit*), Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah dan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (*E-Purchasing*). Sebagai pedoman bagi ULP (pokja/panitia pengadaan) atau pejabat pengadaan dalam menyusun dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik LKPP akan segera merilis Standar Dokumen Pengadaan (SDP *E-Procurement*) dengan tujuan agar Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang dilakukan secara elektronik berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan.

Dalam melakukan analisis, diperlukan sebuah standar yang bisa membantu agar terjadi pengukuran yang *valid* dan *reliable*. Menurut Sarno (2009 : 16) agar TI dapat sukses memenuhi kebutuhan bisnis, pihak manajemen seharusnya meletakkan sistem kontrol internal dalam bentuk kerangka kerja yang mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut salah satunya COBIT. *Control Objectives for Information and related Technology* (COBIT) menyediakan standar dalam kerangka kerja domain yang terdiri dari sekumpulan proses TI yang merepresentasikan aktivitas yang dapat dikendalikan dan terstruktur. Secara garis besar, kerangka kerja COBIT terdiri atas empat domain utama yaitu *Plan and Organize* atau PO (Mendefinisikan rencana strategis TI, Mendefinisikan arsitektur informasi, Menentukan arahan teknologi, Mendefinisikan proses TI, organisasi dan keterhubungannya, Mengelola investasi TI, Mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen, Mengelola sumber daya TI, Mengelola kualitas, Menaksir

daan mengelola resiko TI, Mengelola proyek), *Acquire and Implement* atau AI (Mengidentifikasi solusi otomatis, Memperoleh dan memelihara perangkat lunak aplikasi, Memperoleh dan memelihara infrastruktur teknologi, Memungkinkan operasional dan penggunaan, Memenuhi sumber daya TI, Mengelola perubahan, Instalasi dan akreditasi solusi beserta perubahannya), *Deliver and Support* atau DS (Mendefinisikan dan mengelol tingkat layanan, Mengelola layanan pihak ketiga, Mengelola kinerja dan kapasitas, Memastikan layanan yang berkelanjutan, Memastikan keamanan sistem, Mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya, Mendidik dan melatih pengguna, Mengelola *service desk* dan insiden, Mengelola konfigurasi, Mengelola permasalahan, Mengelola data, Mengelola lingkungan fisik, Mengelola operasi) serta *Monitor and Evaluate* atau ME (Mengawasi dan mengevaluasi kinerja TI, Mengawasi dan mengevaluasi kontrol internal, Memastikan pemenuhan terhadap kebutuhan eksternal, Menyediakan tata kelola TI). Adapun penelitian ini berfokus pada domain ME1 dimana domain ini mencakup pengawasan dan pengevaluasian kinerja TI.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat pembahasan sebagai bahan penelitian dengan judul “**Analisis Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan Menggunakan Metode COBIT 4.0 Pada Badan Pengusahaan Batam**”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas yang telah dikemukakan, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Proses audit tidak pernah dilakukan oleh pihak instansi Badan Pengusahaan Batam melainkan audit dilakukan dari pusat.
2. Tidak bisa sekaligus melakukan pelelangan sehingga pelelangan-pelelangan lainnya harus menunggu hingga pelelangan awal selesai dikerjakan.
3. Dalam melakukan pelelangan seringkali pihak penyedia menggunakan IP yang sama sehingga menimbulkan pertanyaan oleh aparat pemeriksa.

1.3. Batasan Masalah

Keterbatasan mahasiswa dalam penelitian serta untuk membuat pembahasan lebih terarah menyebabkan batasan masalah perlu untuk penulis deskripsikan. Adapun Batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Data yang dihimpun pada Badan Pengusahaan Batam dimulai dari bulan Oktober 2016 sampai Januari 2017.
2. Penelitian ini menggunakan COBIT 4.0 yang berfokus pada ME1 (*Monitor and Evaluate IT Performance*).

1.4. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana *monitoring approach* pada Badan Pengusahaan Batam?
2. Bagaimana *definition and collection of monitoring data* pada Badan Pengusahaan Batam?
3. Bagaimana *monitoring method* pada Badan Pengusahaan Batam?
4. Bagaimana *performance assesment* pada Badan pengusahaan Batam?
5. Bagaimana *board and executive reporting* pada Badan Pengusahaan Batam?
6. Bagaimana *remedial actions* pada Badan Pengusahaan Batam?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui *monitoring approach* pada Badan Pengusahaan Batam.
2. Untuk mengetahui *definition and collection of monitoring data* pada Badan Pengusahaan Batam
3. Untuk mengetahui *monitoring method* pada Badan Pengusahaan Batam.
4. Untuk mengetahui *performance assesment* pada Badan pengusahaan Batam.
5. Untuk mengetahui *board and executive reporting* pada Badan Pengusahaan Batam.
6. Untuk mengetahui *remedial actions* pada Badan Pengusahaan Batam.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Secara Teoritis

Adapun manfaat secara teoritis adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan proses analisis sistem informasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Memberikan pengetahuan tentang mengukur tingkat kematangan (*Maturity Level*) pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

1.6.2. Secara Praktis

Adapun manfaat secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pengusahaan Batam

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan guna meningkatkan kinerja Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang digunakan untuk pengadaan barang pada pemerintahan.

2. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan mengenai tingkat kematangan suatu sistem dengan menggunakan metode COBIT 4.0.

3. Bagi Akademis

Memberikan referensi bagi para mahasiswa yang ingin memahami konsep COBIT 4.0 serta pemahaman terhadap SPSE dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.